



## DI BALIK EKSOTISME: KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PROVINSI BALI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I Gede Putu Dharma Yusa

### Article history:

Submitted: 1 November 2024

Revised: 23 Desember 2024

Accepted: 24 Desember 2024

### Keywords:

Poverty;

Inequality;

Pro-poor Growth;

Years of Schooling;

Economic Support Ratio;

### Abstract

Numerous studies have examined poverty and inequality, yet comparisons between regions, particularly tourist destinations, remain limited. This study aims to compare the profiles of poverty and inequality between Bali and Special Region of Yogyakarta (DIY) Province over the past decade and to investigate the determinants of poverty in terms of education and employment. Data was sourced from publication by BPS-Statistics Indonesia and further analyzed using data from the National Socioeconomic Survey (Susenas) in 2014, 2019, and 2023. Poverty and inequality profiles were examined using the Foster-Greer-Thorbecke (FGT) index, the Gini ratio, Theil L index, and Growth Incidence Curve (GIC). Household-level determinants were analyzed through linear regression with Ordinary Least Squares (OLS), logistic regression, and Classification and Regression Tree (CART). The findings indicate that while both are tourist destinations, Bali has a better poverty and inequality profile than DIY. Over the past decade, Bali experienced pro-poor growth, whereas inequality in DIY increased due to non-pro-poor growth. Furthermore, this study finds that years of schooling and economic support ratio significantly enhance welfare or reduce the likelihood of poverty. Among the two determinants, the CART analysis shows that years of schooling are the primary determinant of poverty in these two provinces.

### Kata Kunci:

Kemiskinan;

Ketimpangan;

Pertumbuhan *pro-poor*;

Lama Sekolah;

Daya Dukung Ekonomi;

### Abstrak

Studi kemiskinan dan ketimpangan telah banyak dilakukan, tetapi masih terbatas studi yang membandingkan antar daerah terutama daerah tujuan wisata. Karena itu, studi ini bertujuan untuk membandingkan potret kemiskinan dan ketimpangan Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama satu dekade terakhir serta menyelidiki determinan kemiskinan dari sisi pendidikan dan pekerjaan. Data bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang didalami lebih lanjut dengan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014, 2019, dan 2023. Potret kemiskinan dan ketimpangan dilihat dari indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT), rasio Gini, indeks Theil L, dan *Growth Incidence Curve* (GIC); sedangkan determinan di tingkat rumah tangga ditelusuri melalui model regresi linier dengan *Ordinary Least Square* (OLS), regresi logit, dan *Classification and Regression Tree* (CART). Hasilnya, meskipun sama-sama daerah tujuan wisata, Bali memiliki potret kemiskinan dan ketimpangan yang lebih baik dibandingkan DIY. Saat Bali yang dalam satu dekade terakhir mengalami pertumbuhan *pro-poor*, ketimpangan di DIY justru meningkat karena pertumbuhan yang tidak *pro-poor*. Studi ini juga menemukan bahwa lama sekolah dan daya dukung ekonomi terbukti secara signifikan meningkatkan kesejahteraan atau menurunkan peluang menjadi miskin. Diantara dua determinan tersebut, analisis CART menunjukkan bahwa lama sekolah menjadi determinan utama kemiskinan di dua provinsi ini.

### Koresponding:

Badan Pusat Statistik Republik

Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [yusa@bps.go.id](mailto:yusa@bps.go.id)

## PENDAHULUAN

Mendalami masalah kemiskinan dan ketimpangan secara regional menjadi penting karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang khas, yang secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Dua daerah yang menjadi sorotan karena keunikan karakteristik tersebut adalah Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Eksotisme alam, budaya, dan masyarakat kemudian meletakkan pariwisata menjadi motor perekonomian kedua provinsi ini. Namun, pariwisata seperti pisau bermata dua. Dalam hal kemiskinan dan ketimpangan, pariwisata sering kali memunculkan polarisasi ekonomi, di mana masyarakat yang terlibat langsung mendapat manfaat yang besar, sementara yang lain relatif tertinggal (Llorca-Rodríguez *et al.*, 2016; Witari & Saidi, 2023). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali sebesar Rp3,863 triliun dan DIY sebesar Rp2,263 triliun, disumbang terutama oleh pusat pariwisata seperti Kabupaten Badung (Bali) dan Kabupaten Sleman (DIY). Dua kabupaten ini mencatatkan persentase penduduk miskin yang tergolong sangat rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di masing-masing provinsi tersebut.

Di sisi lain, sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang paling rentan terhadap guncangan eksternal (Dogru *et al.*, 2019; Arbulú *et al.*, 2021). Pandemi COVID-19 misalnya, pembatasan perjalanan hingga penutupan destinasi wisata mendorong penurunan tajam jumlah wisatawan terutama di daerah pariwisata seperti Bali dan DIY. Data BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2020 turun 82,957% sementara yang berkunjung ke DIY turun 83,509%. Kondisi ini berdampak langsung pada perekonomian, menyebabkan kehilangan lapangan kerja, penurunan pendapatan, dan berakhir pada peningkatan kemiskinan. Tidak hanya itu, penurunan aktivitas pariwisata juga berkontribusi pada ketimpangan yang lebih besar, di mana segmen masyarakat yang paling terpukul adalah mereka yang bergantung pada pekerjaan di sektor ini, terutama para pekerja informal. Studi-studi sebelumnya menunjukkan penurunan aktivitas pariwisata yang tajam di Bali dan DIY saat pandemi COVID-19 (Kumara *et al.*, 2011; Pramana *et al.*, 2022) dan berdampak pada anjloknya kinerja perekonomian daerah, pengurangan tenaga kerja terutama di sektor pariwisata, penurunan pendapatan, serta peningkatan kemiskinan dan ketimpangan di kedua provinsi tersebut (Rahayu & Muharam, 2021; Sun *et al.*, 2021; Fitriyani & Pramana, 2022; Pham & Nugroho, 2022).

Studi ini mengeksplorasi kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Bali dan DIY untuk mengetahui bagaimana dua daerah tujuan pariwisata ini menghadapi paradoks antara perkembangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi. Tidak hanya berfokus pada potret kemiskinan dan ketimpangan, pemahaman mendalam mengenai alasan orang menjadi miskin dan timpang antara yang satu dan lainnya perlu dieksplorasi. Houghton & Khandker (2009) merangkum tiga faktor atau determinan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu karakteristik wilayah (seperti letak geografis, sumber daya alam, kondisi alam dan bencana, dan kualitas pemerintahan), karakteristik masyarakat (seperti infrastruktur, layanan publik, distribusi lahan, dan modal sosial), serta karakteristik rumah tangga dan individu (demografi – jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan gender; ekonomi – status pekerjaan, jam kerja, dan kepemilikan aset; sosial – status kesehatan, pendidikan, dan perumahan). Di sisi lain, determinan kemiskinan dan ketimpangan juga dapat dilihat dari perspektif *rights-based approach* yang berfokus pada hak-hak dasar manusia untuk hidup secara layak, seperti hak atas lahan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan (Moeis, 2018).

Studi-studi sebelumnya telah banyak yang membahas determinan kemiskinan dan ketimpangan regional di Indonesia (Bidani & Ravallion, 1993; Miranti, 2017; Nurjati, 2021; Febriandika *et al.*, 2022; Mustika *et al.*, 2023), tetapi masih terbatas studi yang berfokus di daerah tujuan wisata dan komparasi antar daerah tersebut. Studi Nina & Rustariyuni (2020), Maharani (2020), Said & Sasongko (2022), dan Subadra *et al.* (2023) menemukan bahwa gini rasio, pengangguran, dan jumlah penduduk berhubungan positif dengan kemiskinan, sedangkan upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, partisipasi pendidikan tinggi, angka melek huruf, pengeluaran non makanan, dan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Di Provinsi DIY, studi Yuliani *et al.* (2021), Khoirudin & Nasir (2022), Maurilla *et al.* (2022), dan Ayuandina & Hasanah (2023) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pendidikan, dan upah minimum berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Studi-studi tersebut berfokus pada variabel agregat dan analisis di masing-masing wilayah, sehingga belum dapat menjelaskan variasi dan perbandingan karakteristik rumah tangga miskin di kedua provinsi tersebut.

Studi di tingkat rumah tangga memungkinkan eksplorasi karakteristik dan determinan kemiskinan secara lebih mendalam. Di Indonesia, studi-studi yang ada umumnya menggunakan data *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Studi dengan data IFLS (Alisjahbana & Yusuf, 2003; Widyanti *et al.*, 2009; Dartanto & Otsubo, 2016; Dartanto *et al.*, 2020; Sugiharti *et al.*, 2022) menemukan determinan berupa karakteristik kepala rumah tangga (KRT) seperti usia, gender, status perkawinan, status bekerja, tingkat pendidikan, dan lama sekolah; karakteristik rumah tangga seperti jumlah dan komposisi rumah tangga, rasio ketergantungan, akses air bersih dan listrik, kepemilikan aset, dan status kesehatan; dan karakteristik wilayah seperti perdesaan/perkotaan, infrastruktur, dan faktor bencana alam. Studi dengan data Susenas (Dartanto & Nurkholis, 2013; Akita & Dariwardani, 2013; Artha & Dartanto, 2018) juga menemukan determinan kemiskinan yang kurang lebih sama. Bahkan, Dartanto & Nurkholis (2013) menemukan rumah tangga di Jawa-Bali lebih rentan terhadap guncangan daripada rumah tangga di luar Jawa-Bali, terutama karena faktor kegagalan panen, kehilangan pekerjaan, dan perubahan harga yang mendorong mereka menjadi rumah tangga miskin dan miskin sementara (transien). Secara spesifik, Dariwardani (2014) dan Permatasari & Yuliana (2021) dengan fokus studi di Bali menemukan determinan kemiskinan yaitu jumlah anggota rumah tangga, gender, usia, dan lapangan usaha KRT, serta status wilayah desa/kota. Di mana, rumah tangga dengan KRT yang dikepalai oleh perempuan cenderung 1,274 kali lebih sejahtera dibandingkan laki-laki, atau KRT yang bekerja di sektor nonpertanian 1,613 kali lebih sejahtera dibandingkan yang bekerja di pertanian (Permatasari & Yuliana, 2021). Studi Parwodiwiyono (2022), Cholily (2022), Nalom & Sumarni (2023), dan Nuryadin *et al.* (2024) menemukan determinan yang serupa di DIY, termasuk bantuan sosial, akses teknologi dan internet, asuransi, dan keluhan kesehatan. Di mana, kepemilikan asuransi kesehatan dapat menurunkan tingkat kemiskinan terutama kemiskinan nonmakanan sebesar 29,5% (Nuryadin *et al.*, 2024) dan pekerja wisata yang tidak menggunakan internet 1,596 kali lebih besar menjadi miskin dibandingkan yang menggunakan internet (Nalom & Sumarni, 2023). Meskipun demikian, studi kemiskinan di tingkat rumah tangga baik di Provinsi Bali maupun DIY tersebut hanya berfokus pada kondisi di masing-masing provinsi sehingga kurang bisa dibandingkan hasilnya antar kedua provinsi tersebut.

Maka dari itu, dengan melihat perkembangan satu dekade terakhir, studi ini bertujuan untuk membandingkan potret kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Bali dan DIY. Lebih lanjut, studi ini juga menyelidiki determinan kemiskinan tingkat rumah tangga di dua provinsi tersebut dengan mempertimbangkan pendekatan kemiskinan berbasis hak-hak dasar (*rights-based approach*), terutama hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dengan dua tujuan utama ini, studi ini akan memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kemiskinan dan ketimpangan di balik keindahan dua provinsi yang menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia ini.

## METODE PENELITIAN

Studi ini mengeksplorasi dan membandingkan potret kemiskinan di Provinsi Bali dan DIY menggunakan ukuran indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT) dan *Growth Incidence Curve* (GIC). Adapun formula indeks FGT adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^Q \left( \frac{z-y_i}{z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots (1)$$

Di mana  $N$  adalah populasi,  $Q$  adalah jumlah penduduk miskin,  $z$  adalah garis kemiskinan,  $y_i$  adalah pengeluaran per kapita, dan  $\alpha$  adalah sensitivitas indeks. Jika  $\alpha = 0$  maka diperoleh *head count index* ( $P_0$ ) atau proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan. Jika  $\alpha = 1$  maka diperoleh indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) atau ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika  $\alpha = 2$  maka diperoleh indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) atau distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Sementara, *Growth Incidence Curve* (GIC) digunakan untuk mengukur *rate of pro-poor growth* di Provinsi Bali dan DIY dalam sepuluh tahun terakhir sebagaimana diusulkan oleh Ravallion & Chen (2003). Kurva ini menghubungkan *growth* pengeluaran dan penduduk menurut persentil dengan rata-rata *growth* sebagai acuan.

Selain ukuran kemiskinan, studi ini juga menggunakan ukuran ketimpangan yaitu rasio Gini dan indeks Theil L. Rasio Gini diukur berdasarkan kurva Lorenz, sebuah kurva frekuensi kumulatif yang membandingkan distribusi pengeluaran dengan distribusi seragam yang merepresentasikan kesetaraan. Jika ada ketimpangan, kurva Lorenz akan melengkung menjauhi garis diagonal yang menunjukkan kesetaraan. Luas area di bawah garis kesetaraan dan di atas kurva Lorenz yang kemudian merupakan ukuran rasio Gini. Meskipun rasio Gini memenuhi kriteria ukuran ketimpangan yang baik, yaitu *mean independence*, *population size independence*, *symmetry*, dan *Pigou-Dalton Transfer sensitivity*; tetapi rasio Gini belum bisa memenuhi kriteria *decomposability* dan *statistical testability* (Haughton & Khandker, 2009). Karena itu, studi ini juga dilengkapi dengan indeks Theil L yang merupakan ukuran ketimpangan dari keluarga *Generalized Entropy* (GE). Indeks ini merupakan GE dengan tingkat sensitivitas ( $\alpha$ ) = 0, di mana ukuran ini lebih sensitif pada perubahan pada ekor bawah dari distribusi penduduk miskin. Rumus rasio Gini ( $G$ ), *Generalized Entropy* ( $GE(\alpha)$ ), dan indeks Theil L ( $L$ ) adalah:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1})(y_i + y_{i-1}) = 1 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i + y_{i-1}) \dots\dots\dots (2)$$

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left[ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln \left( \frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right] \dots\dots\dots (3)$$

$$L = GE(0) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln \left( \frac{\bar{y}}{y_i} \right) \dots\dots\dots (4)$$

Di mana  $x$  adalah distribusi penduduk,  $y$  adalah pengeluaran per kapita,  $\bar{y}$  adalah rata-rata pengeluaran per kapita, dan subskrip  $i$  menunjukkan individu. Rasio Gini atau indeks Theil L mendekati 0 artinya distribusi yang lebih merata, sedangkan rasio Gini mendekati 1 atau indeks Theil L mendekati tak hingga ( $\infty$ ) artinya semakin timpang.

Setelah mengukur kemiskinan dan ketimpangan, studi ini dilanjutkan dengan mengidentifikasi determinan kemiskinan rumah tangga yang berfokus pada hak dasar atas pendidikan yang diukur dengan lama sekolah KRT dan pekerjaan yang diukur dengan daya dukung ekonomi. Merujuk pada Haughton & Khandker (2009), studi ini merancang dua model empiris sebagai berikut:

$$\log \left( \frac{y_i}{z} \right) = \beta_0 + \beta_1 yos_i + \beta_2 \log(esr_i) + \boldsymbol{\varphi}' \mathbf{W}_i + \mu_i \dots\dots\dots (5)$$

$$miskin_i = \gamma_0 + \gamma_1 yos_i + \gamma_2 \log(esr_i) + \boldsymbol{\omega}' \mathbf{W}_i + \vartheta_i \dots\dots\dots (6)$$

Di mana  $\frac{y}{z}$  adalah rasio pengeluaran per kapita terhadap garis kemiskinan, *miskin* adalah status miskin (1=miskin, 0=tidak); *yos* adalah lama sekolah KRT; *esr* adalah daya dukung ekonomi (*economic support ratio*);  $\mathbf{W}$  adalah matriks variabel kontrol yang terdiri dari *age* (usia KRT), *age\_sq* (usia KRT kuadrat), *gender* (gender KRT, 0=laki-laki dan 1=perempuan), *urban* (status wilayah, 0=perdesaan dan 1=perkotaan), dan *prov* (provinsi, 0=DIY dan 1=Bali);  $\mu$  dan  $\vartheta$  adalah *error term*, serta subskrip  $i$  menunjukkan rumah tangga. Persamaan (5) diestimasi dengan *Ordinary Least Square* (OLS) dan persamaan (6) diestimasi dengan regresi logistik. Secara spesifik, studi ini mendalami lebih lanjut persamaan (6) dengan menentukan cara mengidentifikasi rumah tangga miskin. Model ini dibangun menggunakan *Classification and Regression Tree* (CART) dengan mempertimbangkan variabel utama yaitu lama sekolah KRT dan daya dukung ekonomi.

Untuk mengukur potret kemiskinan, ketimpangan, dan determinannya, studi ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2014, 2019, dan 2023 Provinsi Bali dan

DIY. Pemilihan dua provinsi ini untuk membandingkan potret kemiskinan dan ketimpangan di dua daerah pariwisata terkemuka di Indonesia. Selain itu, studi ini juga mengumpulkan garis kemiskinan perdesaan dan perkotaan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan digunakan untuk menentukan status miskin setiap rumah tangga berdasarkan status tempat tinggal (perdesaan/perkotaan), di mana berstatus miskin jika pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dan tidak miskin jika di atas garis kemiskinan. Lama sekolah dihitung mengikuti panduan dari BPS (2023a) yang mempertimbangkan status bersekolah, jenjang pendidikan, dan kelas terakhir yang ditempuh oleh individu, dengan rentang lama sekolah berkisar antara 0 tahun (tidak/belum bersekolah) sampai dengan 22 tahun (lulus S3). Daya dukung ekonomi diukur dengan menghitung rasio jumlah anggota rumah tangga yang bekerja (tenaga kerja efektif) per jumlah anggota rumah tangga (konsumen efektif) dengan rasio antara 0 sampai dengan 1. Secara lebih lengkap, deskripsi variabel dan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Variabel dan Data Penelitian**

Variabel	Satuan	Deskripsi/Pengukuran	Tahun	Sumber data
<b>Ukuran kemiskinan dan ketimpangan</b>				
Pengeluaran per kapita ( $y$ )	Rp	Pengeluaran makanan dan non makanan per bulan dibagi total ART	2014, 2019, 2023	Susenas, BPS (diolah)
Rata-rata pengeluaran per kapita ( $\bar{y}$ )	Rp	Pengeluaran per kapita dibagi dengan jumlah penduduk	2014, 2019, 2023	Susenas, BPS (diolah)
Garis kemiskinan ( $z$ )	Rp	Kebutuhan dasar minimum untuk makanan dan non makanan per bulan menurut perdesaan/perkotaan	2014, 2019, 2023	Publikasi BPS
Jumlah penduduk miskin ( $Q$ )	orang	Jumlah orang yang berstatus miskin, atau pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan	2014, 2019, 2023	Susenas, BPS
<b>Determinan kemiskinan dan ketimpangan</b>				
Variabel dependen				
Rasio pengeluaran per kapita terhadap garis kemiskinan ( $\frac{y}{z}$ )	-	Rasio pengeluaran per kapita relatif terhadap garis kemiskinan menurut perdesaan/perkotaan	2023	Susenas, BPS (diolah)
Status miskin ( <i>miskin</i> )	dummy	1=miskin, 0=tidak miskin	2023	Susenas, BPS (diolah)
Variabel independen (determinan utama)				
Lama sekolah KRT ( $yos$ )	tahun	Lama tahun sekolah yang pernah/sedang dijalani oleh KRT. Dihitung dengan mempertimbangkan status bersekolah, jenjang pendidikan, dan kelas terakhir.	2023	Susenas, BPS (diolah)
Daya dukung ekonomi ( $esr$ )	-	Rasio jumlah anggota rumah tangga yang bekerja per jumlah anggota rumah tangga.	2023	Susenas, BPS (diolah)
Variabel kontrol				
Usia KRT ( $age$ )	tahun	Usia yang diukur dari ulang tahun terakhir KRT	2023	Susenas, BPS
Gender KRT ( $gender$ )	dummy	1=perempuan, 0=laki-laki	2023	Susenas, BPS
Status wilayah ( $urban$ )	dummy	1=perkotaan, 0=perdesaan	2023	Susenas, BPS
Provinsi ( $prov$ )	dummy	1=Bali, 0=DIY	2023	Susenas, BPS

Sumber: Data Penelitian, 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun sama-sama menjadi daerah tujuan wisata, Provinsi Bali dan DI Yogyakarta (DIY) memiliki potret kemiskinan yang jauh berbeda. Pada Tabel 2, secara umum garis kemiskinan Bali tercatat lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan DIY. Hal ini menunjukkan nilai pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sebulan di Bali relatif lebih rendah dibandingkan di DIY. Pada tahun 2023 misalnya, pengeluaran kebutuhan pokok minimum dalam sebulan di Bali sebesar Rp529.643 sedangkan di DIY sebesar Rp573.022. Kondisi ini disebabkan oleh garis kemiskinan makanan (kebutuhan pangan minimum) di Bali yang selalu lebih rendah dibandingkan DIY, meskipun garis kemiskinan non makanan Bali tercatat sedikit lebih tinggi. Baik di Bali maupun DIY, komoditas makanan yang sama-sama berkontribusi besar dalam garis kemiskinan yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan telur ayam ras (BPS, 2023c; BPS, 2023d). Sementara untuk non makanan, komoditas yang sama-sama berkontribusi besar dalam garis kemiskinan antara lain perumahan, bensin, dan listrik (BPS, 2023c; BPS, 2023d). Yang membedakan adalah komponen upacara agama atau adat yang memiliki andil cukup besar bagi garis kemiskinan non makanan di Provinsi Bali. Jika dilihat dari karakteristik wilayah, garis kemiskinan perkotaan Bali selalu lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan perkotaan DIY, tetapi garis kemiskinan perdesaan Bali lebih tinggi dibanding DIY pada tahun 2014 dan 2019 serta sedikit lebih rendah pada tahun 2023. Baik di perdesaan maupun di perkotaan, garis kemiskinan makanan selalu lebih tinggi dibanding non makanan, menunjukkan bahwa pendapatan untuk kebutuhan hidup minimum lebih banyak dihabiskan untuk konsumsi makanan dibandingkan non makanan.

**Tabel 2.**  
**Garis Kemiskinan Bali dan DIY (Rupiah/Kapita/Bulan)**

Indikator	2014			2019			2023		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
<b>Bali</b>									
Makanan	213.970	192.233	205.477	269.879	278.769	275.834	340.646	375.253	365.437
Non Makanan	96.351	79.413	89.733	113.239	130.026	124.790	147.988	170.447	164.206
Total	310.321	271.646	295.210	383.118	408.795	400.624	488.634	545.700	529.643
<b>DIY</b>									
Makanan	220.412	227.691	225.245	279.124	323.635	310.947	366.712	431.962	414.480
Non Makanan	65.725	99.582	88.207	99.749	128.993	121.079	133.230	166.963	158.542
Total	286.137	327.273	313.452	378.873	452.628	432.026	499.942	598.925	573.022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Dengan batas garis kemiskinan di atas, studi ini menghasilkan indikator kemiskinan seperti pada Tabel 3. Secara umum, tingkat kemiskinan Bali lebih rendah dan lebih baik dibandingkan DIY dari ketiga ukuran indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT). Dengan *head count index* ( $P_0$ ), pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Bali hanya tercatat 4,25% dari populasi, sementara DIY jauh lebih tinggi mencapai 11,04%. Secara jumlah, penduduk miskin di Bali pada Maret 2023 tercatat sebanyak 193,78 ribu orang dan di DIY tercatat dua kali lipatnya, yaitu 448,47 ribu orang (BPS, 2023c; BPS, 2023d). Secara wilayah, sebaran proporsi penduduk miskin lebih terkonsentrasi di perdesaan dibandingkan perkotaan, di mana Bali sebesar 5,50% dan DIY sebesar 13,36%. Sementara dinamika dalam sepuluh tahun terakhir terlihat perbedaan yang menarik di kedua provinsi. Dibandingkan tahun 2014 dan 2019, persentase penduduk miskin DIY pada tahun 2023 mengalami penurunan baik secara total maupun menurut wilayah perkotaan dan perdesaan. Sementara di Bali, meskipun proporsi penduduk miskin mengalami tren penurunan dibandingkan tahun 2014, jika dibandingkan lima tahun sebelumnya (2019) justru terjadi kenaikan dari 3,79% menjadi 4,25%. Terlebih, proporsi penduduk miskin di wilayah

perdesaan Bali justru meningkat dibanding satu dekade sebelumnya, yaitu dari 5,34% pada tahun 2014 menjadi 5,50% pada tahun 2023.

**Tabel 3.**  
**Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan Bali dan DIY**

Indikator	2014			2019			2023			Perubahan <sup>1)</sup> (%)		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
<b>P0 - Persentase Penduduk Miskin (%)</b>												
Bali	5,34	4,01	4,53	4,88	3,29	3,79	5,50	3,77	4,25	0,16	-0,24	-0,28
DIY	17,36	13,81	15,00	13,89	10,89	11,70	13,36	10,27	11,04	-4,00	-3,54	-3,96
<b>P1 - Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)</b>												
Bali	0,38	0,45	0,42	0,64	0,49	0,53	0,74	0,48	0,55	0,36	0,03	0,13
DIY	2,11	2,22	2,19	1,78	1,73	1,74	2,01	1,62	1,72	-0,10	-0,60	-0,47
<b>P2 - Indeks Keparahan Kemiskinan (%)</b>												
Bali	0,05	0,08	0,07	0,13	0,11	0,11	0,14	0,09	0,10	0,09	0,01	0,03
DIY	0,40	0,53	0,48	0,32	0,41	0,38	0,41	0,37	0,38	0,01	-0,16	-0,10
<b>Rasio Gini</b>												
Bali	0,344	0,423	0,417	0,313	0,370	0,366	0,290	0,367	0,362	-0,03	-0,06	-0,05
DIY	0,323	0,403	0,389	0,328	0,424	0,423	0,362	0,453	0,449	0,06	0,01	0,03
<b>Indeks Theil L</b>												
Bali	0,190	0,303	0,288	0,158	0,226	0,219	0,135	0,221	0,215	-0,06	-0,08	-0,07
DIY	0,170	0,262	0,244	0,173	0,299	0,294	0,211	0,335	0,328	0,04	0,07	0,08

Catatan: <sup>1)</sup>Selisih indikator antara tahun 2023 dan 2014.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 dan Data Penelitian, 2024

Di antara penduduk miskin, dengan indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ), jurang kemiskinan di Bali dan DIY memiliki kedalaman yang berbeda. Pada tahun 2023, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Bali hanya sebesar 0,55% sementara DIY mencapai 1,72%. Menariknya, dari karakteristik wilayah, indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Artinya, baik Bali maupun DIY, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Sementara distribusi pengeluaran antar penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) menunjukkan distribusi yang lebih merata di Bali dibandingkan DIY. Pada tahun 2023 misalnya, keparahan kemiskinan di Bali sebesar 0,10% dan di DIY sebesar 0,38%. Karakteristik wilayah memiliki pola yang hampir serupa, di mana baik di Bali maupun DIY, distribusi pengeluaran penduduk miskin di perdesaan terlihat lebih timpang dibandingkan di perkotaan. Dalam sepuluh tahun terakhir, DIY relatif berhasil menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan terutama di wilayah perkotaan. Sebaliknya, jurang kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin justru meningkat di Bali dan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Artinya, meskipun Bali berhasil menurunkan proporsi penduduk miskin, di antara mereka yang miskin, rata-rata pengeluarannya justru semakin jauh dari garis kemiskinan dan distribusi di antara mereka semakin tidak merata dibandingkan kondisi satu dekade sebelumnya. Sementara di DIY, penurunan proporsi penduduk miskin diiringi dengan perbaikan kondisi di antara penduduk miskin, di mana rata-rata pengeluaran mereka semakin dekat dengan garis kemiskinan dan distribusi yang semakin merata relatif terhadap kondisi sepuluh tahun sebelumnya.

Potret ketimpangan ekonomi di Bali juga terlihat lebih baik dibandingkan DIY. Pada Tabel 3, meskipun sama-sama di tingkat yang moderat, rasio Gini Bali pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,362, lebih rendah dibandingkan DIY sebesar 0,449. Jika pengeluaran penduduk miskin lebih timpang di perdesaan dibandingkan perkotaan, rasio Gini menunjukkan sebaliknya. Pada kedua provinsi, rasio Gini di perkotaan selalu tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Artinya, dibandingkan seluruh populasi di masing-masing wilayah, ketimpangan ekonomi di perkotaan lebih parah dibandingkan di perdesaan. Atau, pengeluaran penduduk di perdesaan relatif lebih merata dibandingkan di perkotaan. Indeks Theil

L yang lebih sensitif terhadap ketimpangan kelas bawah memvalidasi temuan ini. Pada Tabel 2 terlihat bahwa indeks Theil Bali pada tahun 2023 sebesar 0,215, lebih rendah dibandingkan DIY dengan indeks 0,328. Meskipun pada tahun 2014 rasio Gini dan indeks Theil L di Bali lebih tinggi dibandingkan DIY, dalam sepuluh tahun terakhir Bali berhasil menurunkan ketimpangannya. Sebaliknya, ketimpangan di DIY justru menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu yang sama. Hasil rasio Gini dan Indeks Theil ini juga didukung dengan distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran kelompok ini tercatat sebesar 18,50% di perkotaan dan 21,95% di perdesaan Bali (BPS, 2023f). Sementara di DIY, persentase pengeluaran kelompok ini tercatat sebesar 15,21% di perkotaan dan 20,42% di perdesaan (BPS, 2023e). Berdasarkan distribusi ini, ketimpangan di Bali dan perdesaan DIY berada pada kategori rendah, sedangkan ketimpangan di perkotaan DIY berada pada kategori sedang (BPS, 2023e; BPS, 2023f).

**Tabel 4.**  
**Variasi Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan Bali dan DIY**

Indikator		2014	2019	2023	Perubahan <sup>1)</sup> (%)
<b>P0 – Persentase Penduduk Miskin (%)</b>					
Bali	Kab. Badung	2,54	1,78	2,30	-0,24
	Kab. Karangasem	7,30	6,25	6,56	-0,74
DIY	Kota Yogyakarta	7,70	6,84	6,49	-1,21
	Kab. Kulonprogo	20,30	17,39	15,62	-4,68
<b>P1 – Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)</b>					
Bali	Kab. Badung	0,33	0,16	0,11	-0,22
	Kab. Karangasem	0,92	0,75	0,62	-0,30
DIY	Kota Yogyakarta	1,14	0,85	0,86	-0,28
	Kab. Kulonprogo	3,22	2,72	2,54	-0,68
<b>P2 – Indeks Keparahan Kemiskinan (%)</b>					
Bali	Kab. Badung	0,06	0,03	0,01	-0,05
	Kab. Karangasem	0,19	0,14	0,09	-0,10
DIY	Kota Yogyakarta	0,26	0,20	0,18	-0,08
	Kab. Kulonprogo	0,69	0,61	0,61	-0,08
<b>Rasio Gini</b>					
Bali	Kab. Badung	0,340	0,324	0,280	-0,060
	Kab. Karangasem	0,337	0,313	0,337	0,000
DIY	Kota Yogyakarta	0,396	0,371	0,454	0,058
	Kab. Kulonprogo	0,382	0,359	0,402	0,020
<b>Indeks Theil L</b>					
Bali	Kab. Badung	0,198	0,175	0,130	-0,068
	Kab. Karangasem	0,180	0,155	0,185	0,004
DIY	Kota Yogyakarta	0,255	0,232	0,338	0,083
	Kab. Kulonprogo	0,238	0,207	0,263	0,025

Catatan: <sup>1)</sup>Selisih indikator antara tahun 2023 dan 2014.

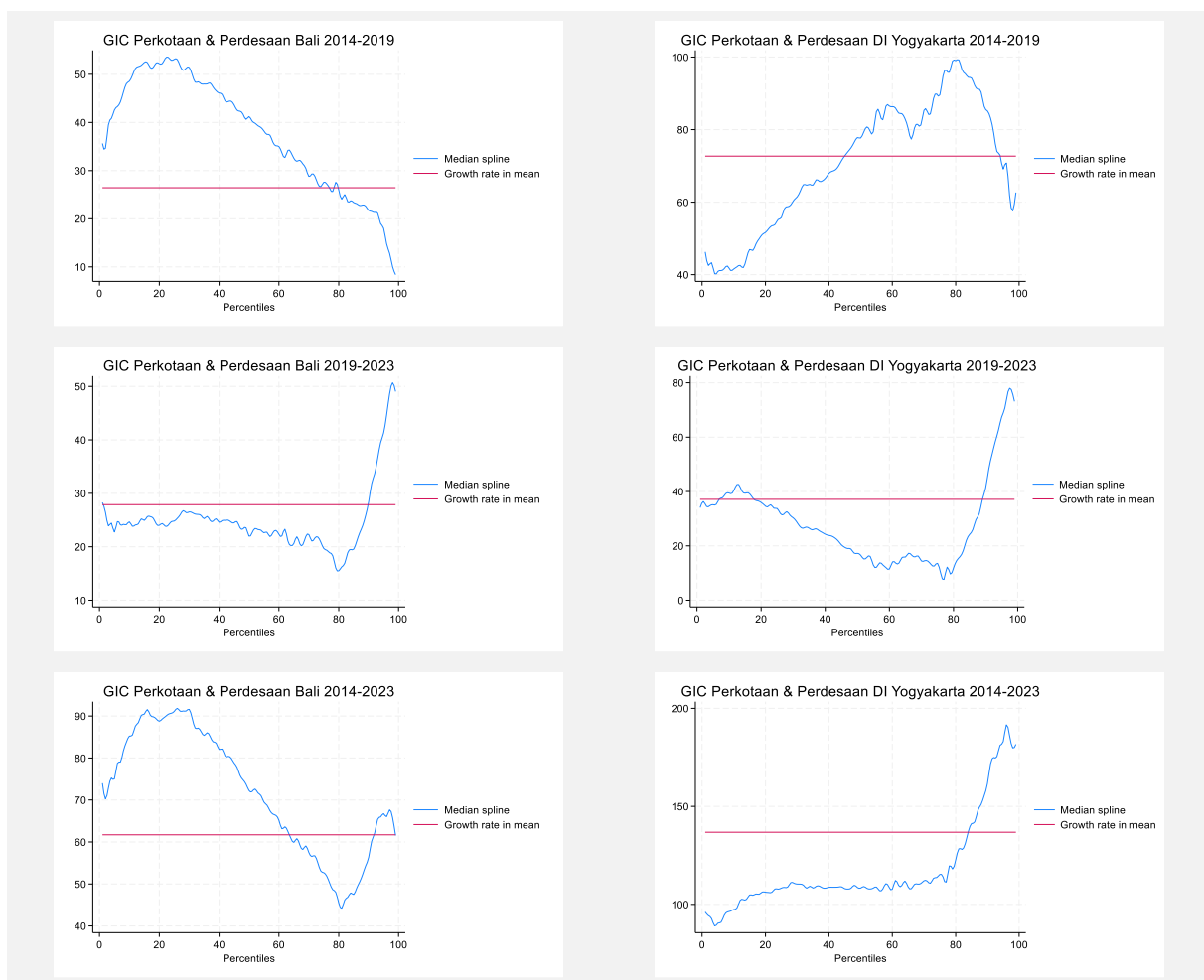
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 dan Data Penelitian, 2024

Studi ini juga melihat bagaimana variasi kemiskinan dan ketimpangan Bali dan DIY jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota. Pada Tabel 4, dengan komparasi kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah dan tertinggi, terlihat bagaimana besarnya variasi indikator kemiskinan dan ketimpangan di dalam provinsi itu sendiri. Di Bali pada tahun 2023, Kabupaten Badung memiliki persentase penduduk miskin terendah (2,30%) atau hampir sepertiga dari angka Kabupaten Karangasem (6,56%). Sementara di DIY, Kota Yogyakarta mencatatkan tingkat kemiskinan terendah (6,49%) dan Kabupaten Kulonprogo tertinggi (15,62%). Jurang yang lebih dalam dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang lebih parah juga terlihat di kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi (Karangasem dan Kulonprogo). Meski demikian, dengan rasio Gini dan indeks Theil L, ketimpangan ekonomi Kota Yogyakarta justru tercatat lebih tinggi dibandingkan Kulonprogo. Dalam



sepuluh tahun terakhir, tingkat kemiskinan di level kabupaten/kota terlihat menurun, tetapi rasio Gini dan indeks Theil L kedua kabupaten/kota di DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Artinya, peningkatan ketimpangan yang terjadi secara umum di tingkat Provinsi DIY juga terjadi baik di kabupaten/kota dengan kemiskinan terendah (Kota Yogyakarta) dan tertinggi (Kulonprogo).

Untuk mendalami dinamika sepuluh tahun terakhir, Gambar 1 yang menyajikan kurva *Growth Incidence Curve* (GIC) dapat menjawab apakah pertumbuhan ekonomi regional mendukung inklusivitas atau mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hasilnya, Bali sepanjang periode I (2014-2019) menunjukkan pertumbuhan yang *pro-poor*, terindikasi dari positif dan tingginya pertumbuhan 40% kelompok pengeluaran terbawah. Namun, pada periode II (2019-2023) justru terjadi pertumbuhan yang cenderung *pro-rich* meskipun secara agregat dalam sepuluh tahun terakhir (2014-2023) masih tetap terlihat pertumbuhan yang *pro-poor*. Sebaliknya, DIY bahkan di setiap periode dan agregat keseluruhan selalu konsisten menunjukkan pertumbuhan yang tidak *pro-poor*. Hal ini yang kemudian bisa menjelaskan fenomena ketimpangan ekonomi sebelumnya. Menurunnya ketimpangan di Bali didorong karena dinamika pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor*, sedangkan meningkatnya ketimpangan di DIY disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang cenderung *pro-rich*.



Sumber: Data Penelitian, 2024

**Gambar 1. Growth Incidence Curve (GIC) Bali dan DIY, 2014-2023**

Studi ini kemudian mengeksplorasi kemiskinan menurut karakteristik individu seperti terlihat pada Tabel 5. Hasilnya, menurut jenis kelamin, ada sebanyak 4,105% laki-laki dan 4,399% perempuan di Bali yang miskin. Sementara di DIY, adanya sebanyak 10,924% laki-laki dan 11,162% perempuan yang miskin. Lebih besarnya proporsi perempuan dibanding laki-laki ini mengindikasikan bahwa perempuan cenderung lebih rentan miskin dibandingkan laki-laki. Kerentanan ini bahkan lebih tinggi

terjadi di wilayah perdesaan dan perkotaan Bali serta perdesaan DIY. Hasil ini sejalan dengan laporan BPS (2023b) secara nasional bahwa persentase perempuan yang berstatus miskin lebih besar dibandingkan persentase laki-laki yang berstatus miskin. Sementara dari sisi kelompok usia, anak-anak menjadi kelompok yang rentan. Hal ini karena 6,556% anak-anak di Bali dan 13,954% anak-anak di DIY tergolong miskin. Hasil ini juga sejalan dengan estimasi *head count index* di tingkat nasional menurut usia kurang dari 18 tahun yang persentasenya lebih besar dibandingkan kelompok yang usianya di atas 18 tahun (BPS, 2023b). Bahkan menurut wilayah, 8,235% anak-anak di perdesaan Bali dan 14,823% anak-anak di perdesaan DIY berasal dari rumah tangga miskin. Pada kelompok usia kerja, ada sekitar 3,436% usia kerja di Bali dan 9,638% usia kerja di DIY yang masuk kategori miskin. Sementara untuk lansia, 5,097% lansia di Bali dan 14,599% lansia di DIY tergolong miskin. Bahkan masih ada 3,302% usia kerja di Bali dan 9,220% usia kerja di DIY yang bekerja tetapi tetap miskin. Termasuk 4,497% lansia di Bali dan 14,834% lansia di DIY yang masih tetap bekerja dan tergolong miskin. Dua temuan ini kemudian menjadi indikasi adanya kemiskinan struktural di kedua provinsi tujuan wisata ini.

**Tabel 5.**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Karakteristik Individu, 2023 (%)**

Karakteristik	Bali			DIY		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
<b>Umum</b>	5,500	3,769	4,252	13,361	10,271	11,044
<b>Menurut jenis kelamin</b>						
Laki-laki	5,289	3,655	4,105	12,775	10,331	10,924
Perempuan	5,707	3,884	4,399	13,904	10,211	11,162
<b>Menurut kategori usia dan status bekerja</b>						
Anak-anak (<=14 tahun)	8,235	5,919	6,556	14,823	13,668	13,954
Usia kerja (15-64 tahun)	4,627	2,991	3,436	12,391	8,782	9,638
Bekerja	4,466	2,825	3,302	11,674	8,373	9,220
Tidak bekerja	5,264	3,433	3,830	14,767	9,699	10,659
Lansia (>=65 tahun)	5,658	4,804	5,097	15,726	14,032	14,599
Bekerja	5,075	4,086	4,497	14,499	15,065	14,834
Tidak bekerja	6,445	5,329	5,638	17,462	13,261	14,382

Catatan: dibandingkan terhadap total populasi di masing-masing kategori, misalnya % perempuan miskin = perempuan miskin dibagi jumlah perempuan.

Sumber: Data Penelitian, 2024

Karakteristik kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya dapat dilihat dari ukuran moneter seperti pengeluaran per kapita, melainkan juga dari demografi dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Tabel 6 menunjukkan bagaimana lama sekolah kepala rumah tangga (KRT) dan ukuran demografi terlihat timpang antar desil pengeluaran. Di Bali, 40% kelompok terbawah dikepalai oleh kepala rumah tangga yang lama sekolahnya sekitar 7,041-8,777 tahun dengan daya dukung ekonomi 51,7-60,3%. Sementara di DIY, lama sekolah kepala rumah tangga 40% kelompok terbawah sedikit lebih rendah dibandingkan Bali yaitu 6,330-8,579 tahun dengan daya dukung ekonomi 52,9-56,8%. Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi desil, semakin tinggi pula rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga. Hasil ini kembali mengonfirmasi bahwa pendidikan memiliki pola hubungan positif dengan kesejahteraan. Studi Dariwardani (2014) menemukan pola yang serupa di Bali, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan KRT maka semakin kecil persentase penduduk miskin, terutama yang berstatus miskin sementara. Selain itu, Bali memiliki pola daya dukung ekonomi yang relatif meningkat seiring bertambahnya desil, tetapi daya dukung ekonomi di DIY mencapai puncaknya hingga desil 6 sebelum kemudian turun secara perlahan pada desil-desil berikutnya. Sementara dari sisi ukuran rumah tangga, baik Bali maupun DIY, semakin berkurang desil pengeluaran diikuti dengan semakin besarnya ukuran rumah tangga, rata-rata jumlah anak yang dimiliki, dan jumlah lansia di rumah tangga tersebut.

**Tabel 6.**  
**Karakteristik Rumah Tangga Menurut Desil Pengeluaran, 2023**

Karakteristik Rumah Tangga	Desil Pengeluaran Per Kapita									
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
<b>Bali</b>										
Rata-rata lama sekolah KRT (thn.)	7,041	7,545	8,127	8,777	9,160	9,525	10,241	10,618	10,978	12,524
Daya dukung ekonomi (%)	0,517	0,583	0,604	0,603	0,618	0,617	0,625	0,648	0,639	0,646
Ukuran rumah tangga (orang)	4,446	4,062	3,858	3,970	3,957	3,819	3,669	3,512	3,328	2,849
Jumlah anak, 0-14 th (orang)	1,410	1,060	0,915	0,965	0,881	0,845	0,722	0,650	0,528	0,379
Jumlah lansia, 65+ (orang)	0,517	0,442	0,402	0,415	0,375	0,349	0,313	0,303	0,260	0,244
<b>DIY</b>										
Rata-rata lama sekolah KRT (thn.)	6,330	7,295	7,993	8,579	8,721	9,298	9,953	10,649	11,714	13,077
Daya dukung ekonomi (%)	0,529	0,553	0,554	0,568	0,615	0,615	0,590	0,583	0,562	0,547
Ukuran rumah tangga (orang)	4,035	3,824	3,611	3,460	3,333	3,283	3,084	2,953	2,659	2,382
Jumlah anak, 0-14 th (orang)	0,993	0,901	0,833	0,705	0,647	0,588	0,526	0,517	0,388	0,263
Jumlah lansia, 65+ (orang)	0,640	0,586	0,466	0,413	0,338	0,280	0,320	0,251	0,281	0,263

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil pengujian statistik pada Tabel 7 menguatkan temuan sebelumnya terutama hubungan lama sekolah, daya dukung ekonomi, dan pengeluaran per kapita sebagai ukuran tingkat kesejahteraan. Dengan menggunakan model 1 untuk gabungan observasi Bali dan DIY (kolom 2), diperoleh bahwa lama sekolah kepala rumah tangga, daya dukung ekonomi, usia dan gender kepala rumah tangga, status wilayah (perdesaan/perkotaan), dan *dummy* provinsi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita relatif terhadap garis kemiskinan. Artinya, seluruh variabel tersebut merupakan determinan kemiskinan secara umum baik di Bali maupun di DIY. Hasil ini mengonfirmasi temuan Dariwardani (2014), Permatasari & Yuliana (2021), dan Nuryadin *et al.* (2024) bahwa umur dan pendidikan kepala rumah tangga serta status wilayah menjadi determinan kemiskinan di Bali dan DIY.

Secara spesifik, model 1 di Bali (kolom 5) menunjukkan jika lama sekolah kepala rumah tangga meningkat 1 tahun, maka pengeluaran per kapita relatif terhadap garis kemiskinan naik sebesar 5,6%. Di DIY (kolom 8), tambahan lama sekolah 1 tahun untuk kepala rumah tangga dapat meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 6,8%. Kedua hasil ini mengindikasikan perbedaan tingkat pengembalian pendidikan (*return to education*) serta dampaknya terhadap kesejahteraan di masing-masing provinsi. Atau, *return to education* di Bali relatif lebih rendah secara persentase dibandingkan dengan di DIY. Sementara itu, kenaikan daya dukung ekonomi sebesar 1% di Bali (kolom 5) dapat meningkatkan pengeluaran per kapita relatif terhadap garis kemiskinan sebesar 0,225%. Sedangkan kenaikan 1% daya dukung ekonomi di DIY (kolom 8) mendorong peningkatan pengeluaran per kapita sebesar 0,297%. Hasil ini menunjukkan bahwa daya dukung ekonomi sebagai indikator dari bonus demografi pertama (*first demographic dividend*) memiliki dampak yang berbeda dalam peningkatan kesejahteraan Bali dan DIY. Dalam hal ini, Bali tercatat menikmati bonus demografi pertama yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan DIY. Pada kedua provinsi, pengaruh usia terhadap pengeluaran per kapita bersifat *increasing but diminishing* (hasil marginal yang menurun), yang artinya terdapat rata-rata puncak usia produktif dengan pengeluaran per kapita maksimal sebelum akhirnya turun seiring bertambahnya usia. Hal menarik lainnya bahwa, di kedua provinsi, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita lebih tinggi dibandingkan yang dikepalai oleh laki-laki. Artinya, kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga memiliki dampak yang lebih besar dalam peningkatan kesejahteraan, seperti ditemukan juga dalam studi Permatasari & Yuliana (2021). Sementara rumah tangga di perkotaan juga memiliki rata-rata pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibanding di perdesaan, yang menunjukkan adanya disparitas pembangunan antar wilayah di kedua provinsi.

**Tabel 7.**  
**Determinan Kemiskinan Bali dan DI Yogyakarta**

Variabel	Umum			Bali			DIY		
	Model 1	Model 2		Model 1	Model 2		Model 1	Model 2	
	Coef.	Coef.	APE	Coef.	Coef.	APE	Coef.	Coef.	APE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
yos	0,062*** (27,88)	-0,194*** (-544,70)	-0,012*** (-518,36)	0,056*** (21,99)	-0,191*** (-303,74)	-0,007*** (-278,31)	0,068*** (18,18)	-0,192*** (-442,47)	-0,017*** (-431,40)
log_esr	0,261*** (11,82)	-1,168*** (-391,19)	-0,073*** (-377,81)	0,225*** (8,38)	-1,404*** (-261,23)	-0,053*** (-245,10)	0,297*** (8,52)	-1,071*** (-302,18)	-0,098*** (-294,72)
age	0,017*** (3,90)	-0,072*** (-118,01)	-0,005*** (-117,20)	0,016*** (3,23)	-0,108*** (-94,30)	-0,004*** (-92,32)	0,014* (1,93)	-0,042*** (-54,71)	-0,004*** (-54,70)
age_sq	-0,000*** (-2,80)	0,001*** (104,95)	0,000*** (104,34)	-0,000* (-1,88)	0,001*** (74,43)	0,000*** (73,31)	-0,0001 (-1,54)	0,000*** (52,19)	0,000*** (52,17)
gender	0,116*** (3,83)	-0,650*** (-110,46)	-0,041*** (-109,95)	0,103** (2,56)	-0,661*** (-49,37)	-0,025*** (-49,12)	0,124** (2,95)	-0,658*** (-99,62)	-0,06*** (-99,27)
urban	0,110*** (6,71)	-0,066*** (-21,32)	-0,004*** (-21,29)	0,138*** (7,32)	-0,198*** (26,25)	-0,008*** (-37,01)	0,073*** (2,62)	-0,003 (0,03)	-0,0002 (-0,68)
prov	0,200*** (10,99)	-1,071*** (-364,00)	-0,067*** (-353,44)						
const.	-0,287*** (-2,56)	0,891*** (52,58)		-0,097 (-0,78)	0,731*** (26,25)		-0,178 (-0,93)	0,001 (0,03)	
Obs.	9.746	9.746		6.099	6.099		3.647	3.647	
R-sq.	0,217			0,201			0,198		

Catatan: gender (0=laki-laki, 1=perempuan), urban (0=perdesaan, 1=perkotaan). APE adalah singkatan dari *Average Partial Effects*. Angka dalam kurung merupakan *t-statistics*. Tanda \*, \*\*, \*\*\* merujuk pada tingkat signifikansi, masing-masing 10%, 5%, dan 1%.

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada Tabel 7, regresi logistik pada model 2 menguatkan hasil model 1 yang ditunjukkan dari signifikansi dan perbedaan arah koefisien, di mana tanda negatif menunjukkan dampak terhadap pengurangan kemiskinan (peluang seseorang menjadi miskin atau pengeluarannya di bawah garis kemiskinan). Pada kolom 3 terlihat bagaimana lama sekolah kepala rumah tangga dan daya dukung ekonomi signifikan menurunkan peluang orang menjadi miskin. Secara spesifik, di Bali (kolom 7), meningkatnya lama sekolah kepala rumah tangga sebesar 1 tahun bisa menurunkan peluang menjadi miskin sebesar 0,7% dan kenaikan 1% daya dukung ekonomi dalam rumah tangga dapat menurunkan peluang seseorang di bawah garis kemiskinan sebesar 5,3%. Demikian halnya di DIY (kolom 10), tambahan sekolah 1 tahun untuk kepala rumah tangga dapat menurunkan peluang miskin 1,7% dan kenaikan 1% daya dukung ekonomi dapat menurunkan peluang menjadi miskin sebesar 9,8%. Studi Permatasari & Yuliana (2021) mengonfirmasi temuan ini bahwa rumah tangga yang memiliki KRT berpendidikan minimal SMA di Bali lebih sejahtera dibandingkan yang berpendidikan maksimal SMP serta studi Nuryadin *et al.* (2024) yang menemukan bahwa rumah tangga yang dikepalai KRT berpendidikan tinggi di DIY lebih cenderung terhindar dari kemiskinan. Baik Bali maupun DIY, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan memiliki rata-rata peluang miskin lebih rendah dibanding yang dikepalai laki-laki. Sekali lagi, artinya bahwa kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga mampu meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan peluang individu (anggota rumah tangga) berada di bawah garis kemiskinan. Dari sisi wilayah, disparitas pembangunan perdesaan dan perkotaan berdampak pada perbedaan peluang menjadi miskin, di mana rumah tangga yang tinggal di perkotaan secara rata-rata peluang menjadi miskinnya lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan.

**Tabel 8.**  
**Determinan Kemiskinan Perdesaan Bali dan DI Yogyakarta**

Variabel	General			Bali			DIY		
	Model 1	Model 2		Model 1	Model 2		Model 1	Model 2	
	Coef.	Coef.	APE	Coef.	Coef.	APE	Coef.	Coef.	APE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
yos	0,039*** (11,90)	-0,152*** (-204,16)	-0,012*** (-202,49)	0,039*** (11,20)	-0,166*** (-138,65)	-0,008*** (-134,41)	0,038*** (5,90)	-0,14*** (-148,81)	-0,015*** (-149,91)
log_esr	0,233*** (6,96)	-1,155*** (-201,12)	-0,088*** (-197,13)	0,267*** (8,18)	-1,434*** (-154,82)	-0,071*** (-145,78)	0,192*** (3,15)	-0,998*** (-139,18)	-0,109*** (-139,03)
age	0,024*** (4,33)	-0,032*** (-28,02)	-0,002*** (-27,98)	0,022*** (3,8)	-0,051*** (-26,15)	-0,003*** (-26,00)	0,020** (2,00)	0,006*** (4,21)	0,001*** (4,21)
age_sq	-0,0002 (-3,90)	0,0003*** (28,19)	0,000*** (28,15)	-0,0002 (-3,18)	0,0004*** (19,39)	0,000*** (19,31)	-0,0002 (-2,05)	0,000 (0,04)	0,000 (0,04)
gender	0,125*** (3,04)	0,061*** (7,59)	0,005*** (7,59)	0,145*** (3,27)	-0,930*** (-44,25)	-0,046*** (-43,80)	0,101** (1,50)	0,345*** (37,00)	0,038*** (37,10)
prov	0,177*** (7,37)	-0,929*** (-182,81)	-0,071*** (-178,72)						
const.	-0,214 (-1,46)	-0,682*** (-20,30)		-0,011 (-0,07)	-0,963*** (-19,13)		-0,081 (-0,29)	-1,888*** (-39,47)	
Obs.	3.600	3.600		2.378	2.378		1.222	1.222	
R-sq.	0,136			0,146			0,080		

Catatan: gender (0=laki-laki, 1=perempuan), urban (0=perdesaan, 1=perkotaan). APE adalah singkatan dari *Average Partial Effects*. Angka dalam kurung merupakan *t-statistics*. Tanda \*, \*\*, \*\*\* merujuk pada tingkat signifikansi, masing-masing 10%, 5%, dan 1%.

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tidak hanya determinan kemiskinan umum, studi ini juga mempertimbangkan determinan kemiskinan perdesaan dan perkotaan dengan analisis subsampel. Pada Tabel 8, dengan cakupan wilayah perdesaan saja, dapat dilihat bagaimana variabel lama sekolah kepala rumah tangga, daya dukung ekonomi, serta usia dan gender kepala rumah tangga menentukan tingkat pengeluaran per kapita relatif terhadap garis kemiskinan dan status kemiskinan. Di perdesaan Bali, jika lama sekolah kepala rumah tangga meningkat 1 tahun, maka pengeluaran per kapita relatif terhadap garis kemiskinan akan naik 3,9% atau peluang menjadi miskin akan turun 0,8%. Sementara kenaikan 1% daya dukung ekonomi akan mendorong kenaikan pengeluaran per kapita 0,267% atau menurunkan peluang miskin sebesar 7,1%. Di perdesaan DIY, tambahan setahun lama sekolah kepala rumah tangga dapat meningkatkan pengeluaran per kapita 3,8% atau menurunkan peluang menjadi miskin sebesar 1,5%. Jika daya dukung ekonomi naik 1%, maka pengeluaran per kapita perdesaan DIY akan naik 0,192% atau menurunkan peluang seseorang menjadi miskin sebesar 10,9%. Jika dibandingkan determinan secara umum untuk seluruh populasi (Tabel 7), dampak lama sekolah dan daya dukung ekonomi relatif lebih besar di wilayah perdesaan. Yang menarik adalah perbedaan dampak gender kepala rumah tangga. Sebagaimana temuan sebelumnya, rumah tangga di perdesaan Bali yang dikepalai oleh perempuan terlihat berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita dan menurunkan peluang menjadi miskin. Namun di perdesaan DIY hasilnya justru berbeda. Meskipun kepemimpinan perempuan bisa meningkatkan pengeluaran per kapita di perdesaan DIY, peluang menjadi miskin tercatat masih lebih besar jika dibandingkan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki.

**Tabel 9.**  
**Determinan Kemiskinan Perkotaan Bali dan DI Yogyakarta**

Variabel	General			Bali			DIY		
	Model 1	Model 2		Model 1	Model 2		Model 1	Model 2	
	Coef.	Coef.	APE	Coef.	Coef.	APE	Coef.	Coef.	APE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
yos	0,069*** (25,43)	-0,207*** (-512,65)	-0,012*** (-476,45)	0,064*** (19,20)	-0,200*** (-274,16)	-0,007*** (-241,11)	0,075*** (17,33)	-0,206*** (-417,66)	-0,017*** (-403,41)
log_esr	0,270*** (10,24)	-1,161*** (-331,71)	-0,067*** (-317,91)	0,215*** (6,49)	-1,404*** (-211,94)	-0,047*** (-198,34)	0,325*** (8,02)	-1,074*** (-264,15)	-0,090*** (-254,6)
age	0,013** (2,27)	-0,092*** (-120,7)	-0,005*** (-119,32)	0,012* (1,76)	-0,137*** (-96,43)	-0,005*** (-93,33)	0,010 (1,18)	-0,062*** (-67,49)	-0,005*** (-67,41)
age_sq	-0,0001 (-1,3)	0,001*** (105,86)	0,000*** (104,83)	-0,00005 (-0,67)	0,001*** (76,78)	0,000*** (75,05)	-0,00006 (-0,76)	0,0005*** (62,46)	0,000*** (62,35)
gender	0,108*** (2,77)	-1,177*** (-134,37)	-0,068*** (-133,52)	0,082 (1,46)	-0,446*** (-25,54)	-0,015*** (-25,47)	0,121** (2,33)	-1,348*** (-136,19)	-0,113*** (-135,34)
prov	0,208*** (9,00)	-1,13*** (-310,37)	-0,065*** (-301,75)						
const.	-0,176 (-1,22)	1,502*** (73,99)		0,030 (0,18)	1,354*** (40,20)		-0,101 (-0,43)	0,714*** (27,85)	
Obs.	6,146	6,146		3,721	3,721		2,425	2,425	
R-sq	0,223			0,189			0,216		

Sumber: Data Penelitian, 2024

### Gambar 2. Hasil *Classification and Regression Tree* (CART) Determinan Kemiskinan Bali dan DIY

Studi ini mendalami determinan kemiskinan dengan model CART sederhana dengan mempertimbangkan 3 (tiga) *tree* dengan hasil seperti Gambar 2. Baik Bali dan DIY, terlihat *node* pertama yang muncul adalah lama sekolah kepala rumah tangga, kemudian diikuti *node* daya dukung ekonomi. Artinya, kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan menjadi determinan utama kemiskinan dibandingkan kuantitas tenaga kerja yang tercermin dari daya dukung ekonomi. Di perdesaan Bali misalnya, kepala rumah tangga yang lama sekolahnya kurang dari 3,5 tahun memiliki peluang menjadi miskin sebesar 10%, di mana peluang miskinnya akan turun menjadi 1% jika mereka memiliki daya dukung ekonomi rumah tangganya di atas 61,2% (minimal 3 orang bekerja dari total 5 anggota rumah tangga). Di perkotaan Bali, batas lama sekolah kepala rumah tangganya pun cukup tinggi, yaitu lebih dari 9,5 tahun agar peluang miskinnya menjadi rendah (2%). Jika kurang dari 9,5 tahun apalagi daya dukung ekonominya kurang dari 58,2%, maka peluang menjadi miskinnya akan menjadi sebesar 14,5%. Sementara di perdesaan DIY, batas lama sekolah kepala rumah tangga sebesar 6,5 tahun agar peluang miskinnya rendah (6,5%). Sedangkan di perkotaan DIY, KRT dengan lama sekolah kurang dari 8,5 tahun dan daya dukung ekonominya kurang dari 84,5% (minimal 4 orang bekerja dari total 5 anggota rumah tangga) memiliki peluang miskin 21%, sedangkan jika lama sekolahnya sudah di atas 8,5 tahun, peluang menjadi miskin hanya sebesar 4,5%.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hasil studi ini menunjukkan adanya perbedaan potret tingkat kemiskinan dan ketimpangan antara Provinsi Bali dan DI Yogyakarta (DIY) yang sama-sama merupakan daerah tujuan wisata di Indonesia. Bali memiliki persentase penduduk miskin yang lebih rendah, jurang kemiskinan yang lebih dangkal, dan distribusi pengeluaran penduduk miskin yang lebih merata dibandingkan DIY. Demikian halnya

dengan ketimpangan, rasio Gini dan indeks Theil L Bali selalu tercatat lebih rendah dibandingkan dengan DIY, bahkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ketimpangan di DIY justru menunjukkan peningkatan. Hal ini dijelaskan dari *Growth Incidence Curve* (GIC) bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY tidak *pro-poor*, sedangkan penurunan ketimpangan Bali disebabkan karena adanya pertumbuhan ekonomi yang relatif *pro-poor* dalam satu dekade terakhir. Dari sisi karakteristik individu, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Sementara pada kelompok usia kerja dan lanjut usia yang bekerja, sebagian diantaranya masih tergolong miskin. Kondisi ini mencerminkan potret kemiskinan struktural di kedua provinsi. Eksplorasi dengan membedah data menurut desil pengeluaran menemukan adanya pola hubungan positif antara lama sekolah kepala rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan. Secara statistik, dengan mempertimbangkan dua model dan perbandingan provinsi serta status wilayah, diperoleh bahwa lama sekolah kepala rumah tangga, daya dukung ekonomi, gender dan usia kepala rumah tangga, serta status wilayah perkotaan dan perdesaan merupakan faktor-faktor penentu kemiskinan, khususnya di Bali dan DIY. Semakin lama tahun sekolah dan semakin tinggi daya dukung ekonomi, maka semakin besar pengeluaran per kapita relatif terhadap garis kemiskinan dan semakin turun peluang individu menjadi miskin. Lebih lanjut, hasil analisis CART untuk mengidentifikasi peluang miskin menunjukkan bahwa lama bersekolah kepala rumah tangga sebagai indikator kualitas sumber daya manusia menjadi determinan utama kemiskinan.

Meskipun studi ini berupaya memotret kemiskinan dan ketimpangan di Bali dan DIY secara mendalam termasuk determinan dari sisi kualitas pendidikan dan pekerjaan, masih terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, studi ini berfokus pada dua provinsi yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata populer di Indonesia, yang tentu saja tidak representatif menggambarkan daerah tujuan wisata lain dan terlalu umum karena tidak semua kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut benar-benar bergantung pada sektor pariwisata. Studi di luar Bali dan DIY atau spesifik di kabupaten/kota tertentu di Bali dan DIY yang bergantung pada sektor pariwisata bisa diteliti lebih lanjut. Kedua, studi ini terbatas pada penggunaan determinan kesejahteraan yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, dan demografi rumah tangga. Studi berikutnya dapat mengeksplorasi determinan hak-hak dasar lain seperti akses kesehatan, jaminan sosial, dan layanan publik. Ketiga, meskipun hasil regresi dengan OLS dan regresi logit menunjukkan konsistensi, dan didukung heterogenitas hasil menurut perkotaan/perdesaan, serta sejalan dengan studi-studi terdahulu, masalah endogenitas dapat ditelusuri lebih lanjut dalam studi berikutnya guna menghasilkan estimasi yang lebih konsisten. Terakhir, model CART dalam studi ini tergolong sederhana karena adanya pembatasan *node*, tujuannya agar *tree* yang dihasilkan tidak kompleks dan mudah untuk diinterpretasikan. Model CART perlu banyak dieksplorasi dalam studi-studi terkait kemiskinan dan ketimpangan, baik secara regional maupun nasional di Indonesia.

## REFERENSI

- Akita, T., & Dariwardani, N. M. I. (2013). Chronic and transient poverty in Indonesia: A spatial perspective with the 2008-2010 Susenas panel data. *Economics & Management Series*, 19, 1–26.
- Alisjahbana, A., & Yusuf, A. A. (2003). Poverty dynamics in Indonesia: panel data evidence. *Department of Economics, Padjadjaran University*, 16.
- Arbulú, I., Razumova, M., Rey-Maqueira, J., & Sastre, F. (2021). Measuring risks and vulnerability of tourism to the COVID-19 crisis in the context of extreme uncertainty: The case of the Balearic Islands. *Tourism Management Perspectives*, 39, 100857.
- Artha, D. R. P., & Dartanto, T. (2018). The multidimensional approach to poverty measurement in Indonesia: Measurements, determinants and its policy implications. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 39(3), 1–38.
- Ayuandina, F. G., & Hasanah, L. lak N. El. (2023). Analysis of factors influencing poverty in special region of Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 3(1), 16–26.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023a). *Buku 5 Pemanfaatan Data Susenas Kor dan KP*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023b). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2023*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023c). *Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta Maret 2023*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023d). *Profil Kemiskinan Provinsi Bali Maret 2023*.

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023e). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta Maret 2023*. Badan Pusat Statistik (BPS). (2023f). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Bali Maret 2023*.
- Bidani, B., & Ravallion, M. (1993). A regional poverty profile for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 29(3), 37–68.
- Cholily, V. H. (2022). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Perempuan Lansia Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(05), 743–764.
- Dariwardani, N. M. I. (2014). Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(1), 44305.
- Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsubo, S. (2020). Intragenerational economic mobility in Indonesia: a transition from poverty to the middle class in 1993–2014. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 193–224.
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: evidence from panel data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), 61–84.
- Dartanto, T., & Otsubo, S. (2016). *Intrageneration poverty dynamics in Indonesia: households' welfare mobility before, during, and after the Asian financial crisis* (117).
- Dogru, T., Marchio, E. A., Bulut, U., & Suess, C. (2019). Climate change: Vulnerability and resilience of tourism and the entire economy. *Tourism Management*, 72, 292–305.
- Febriandika, N. R., Rahayu, C., & Kumar, R. (2022). The Determinant Factors of Poverty in Eastern Indonesia: Evidence from 12 Provinces. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 15(2), 283–299.
- Fitriyani, A. L., & Pramana, S. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on the employment in the tourism sector. *AIP Conference Proceedings*, 2662(1).
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. The World Bank.
- Khoirudin, R., & Nasir, M. S. (2022). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2019. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(2), 1407–1422.
- Kumara, H. C., Prastyo, D., & Rahayu, S. P. (2011). The Impact of the Covid-19 Pandemic on Tourism Sector in Indonesia Using a Structural Path Analysis Based on Inter-Regional Input-Output Matrix. *Journal of Mathematics and Mathematics Education*, 11(2), 13–29.
- Llorca-Rodríguez, C. M., Casas-Jurado, A. C., & García-Fernández, R. M. (2016). The regional polarization of tourism's contribution to economic growth in Peru: alternative solutions. *Tourism Economics*, 22(2), 397–415.
- Maharani, N. P. I. (2020). Mapping the Poverty Incidence in Bali and Its Determinants using GIS. *2020 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS)*, 463–473.
- Maurilla, A., Suriani, S., & Nasir, M. (2022). Do Poverty and Economic Growth Matter for Income Inequality Reduction in Yogyakarta Province? *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 23(2), 308–322.
- Miranti, R. (2017). Understanding the Relationships between Development Factors and Regional Poverty: What Have We Learned from Indonesia? *Journal of Poverty*, 21(6), 483–507.
- Moeis, J. P. (2018). Tantangan dalam Jangka Panjang dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Majelis*, 6, 1.
- Mustika, C., Nurjanah, R., & Wulan, S. K. (2023). Determinants of poverty and income inequality on the islands of Sumatra and Java. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1533–1542.
- Nalom, G. A., & Sumarni, C. (2023). Determinan Kemiskinan Pekerja Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Saat Pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Official Statistics, 2023(1)*, 591–600.
- Nina, G. A., & Rustariyuni, S. D. (2020). Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 24–36.
- Nurjati, E. (2021). The Socioeconomic Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 37(2), 71–80.
- Nuryadin, D., Darpito, S. H., Sultan, S., & Rahmanda, G. A. (2024). Poverty and Inequality in Yogyakarta: Insights from a Comprehensive Study. *2nd International Conference on Advance Research in Social and Economic Science (ICARSE 2023)*, 5–19.
- Parwodiwiyono, S. (2022). Determinan Penduduk Lanjut Usia Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(03), 455–466.
- Permatasari, V. S., & Yuliana, L. (2021). Penerapan Regresi Logistik Biner pada Status Kesejahteraan Rumah Tangga di Provinsi Bali Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021(1)*, 497–506.
- Pham, T., & Nugroho, A. (2022). Tourism-induced poverty impacts of COVID-19 in Indonesia. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 3(2), 100069.
- Pramana, S., Paramartha, D. Y., Ermawan, G. Y., Deli, N. F., & Srimulyani, W. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on tourism in Indonesia. *Current Issues in Tourism*, 25(15), 2422–2442.
- Rahayu, N. T., & Muharam, H. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic on provincial economic performance in Indonesia. *Management Analysis Journal*, 10(1), 23–36.
- Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. *Economics Letters*, 78(1), 93–99.
- Said, R. T. N., & Sasongko, G. (2022). Analysis of Poverty Determinants in The Bali Province 2015-2020. *Media Trend*, 17(2), 343–356.



- Subadra, N. P. A. L., Syafri, & Sofyan, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Bali pada Tahun 2016-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 269–278.
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Jayanti, A. D. (2022). Poverty Dynamics in Indonesia: The Prevalence and Causes of Chronic Poverty. *Journal of Population & Social Studies*, 30.
- Sun, Y.-Y., Sie, L., Faturay, F., Auwalin, I., & Wang, J. (2021). Who are vulnerable in a tourism crisis? A tourism employment vulnerability analysis for the COVID-19 management. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 49, 304–308.
- Widyanti, W., Suryahadi, A., Sumarto, S., & Yumna, A. (2009). The relationship between chronic poverty and household dynamics: evidence from Indonesia. In *Chronic Poverty Research Centre Working Paper* (Issue 132).
- Witari, M. R., & Saidi, A. W. (2023). Konsep Trickle Down dan Polarisasi Effect pada Pembangunan dan Pariwisata di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Teknik Gradien*, 15(01), 94–103.
- Yuliani, R., Rahman, Y. A., Nuraini, D., & Khotimah, K. (2021). Determinants of income inequality in Yogyakarta Province. *International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*, 301–305.